



PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA MENDIDIK DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL (SM-3T)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya buku pedoman Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) ini dapat selesai disusun.

Program SM-3T ini memberikan kesempatan kepada para sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam proses percepatan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan di daerah 3T. Dengan keikutsertaan para sarjana pendidikan tersebut dalam program SM-3T, kami berharap dapat menyiapkan calon pendidik profesional yang mempunyai keterpanggilan untuk mengabdikan dirinya di daerah 3T. Dengan demikian, program SM-3T ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya strategis dalam penyiapan calon pendidik profesional.

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi LPTK penyelenggara dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan program SM-3T. Buku pedoman ini berisi pengertian program, seleksi calon peserta, penyelenggaraan, serta pemantauan dan pendampingan program SM-3T.

Kepada tim penyusun buku pedoman ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga buku ini dapat menjadi amal baik yang berguna untuk pengembangan dunia pendidikan.

Jakarta, Mei 2016

Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	2
C. Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Landasan Yuridis	4
BAB II REKRUTMEN DAN SELEKSI PESERTA PROGRAM SM-3T	5
A. Sasaran	5
B. Perguruan Tinggi Penyelenggara	5
C. Kesiapan jaringan lunak untuk rekrutmen dan seleksi ..	7
D. Rekrutmen	8
E. Seleksi Calon Peserta	11
BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM SM-3T	13
A. LPTK Penyelenggara	13
B. Daerah Sasaran	14
C. Jadwal Persiapan dan Pelaksanaan Program SM-3T 2016	21
D. Kegiatan Prakondisi	21
E. Pemberangkatan Peserta	30
F. Pelaksanaan di Daerah 3T	30
G. Monitoring dan Evaluasi	31
H. Penarikan Peserta	32
I. Pelaporan	32
J. Pembiayaan Pelaksanaan Program.....	32



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wilayah yang luas dan heterogen, secara geografis maupun sosio-kultural, memerlukan upaya yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan, di antaranya permasalahan pendidikan di daerah 3T. Permasalahan tersebut antara lain yang terkait dengan tenaga pendidik, seperti kekurangan jumlah guru (*shortage*), distribusi guru yang tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi guru di bawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*), dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*mismatched*). Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T adalah angka putus sekolah yang masih relatif tinggi, angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang.

Sebagai bagian dari NKRI, daerah 3T memerlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, agar daerah 3T dapat segera maju bersama sejajar dengan daerah lain. Hal ini menjadi perhatian khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengingat daerah 3T memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan keutuhan NKRI.

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempercepat pembangunan pendidikan di daerah 3T adalah Program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM-3T). Program tersebut merupakan sebagian jawaban untuk mengatasi permasalahan pendidikan di daerah 3T.

Program SM-3T ditujukan untuk para Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru, baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru tetap yayasan (GTY). Para sarjana ini nantinya untuk ditugaskan selama satu tahun di daerah 3T. Maksud dari Program SM-3T ini adalah untuk membantu mengatasi kekurangan guru, sekaligus mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

B. Pengertian

Program SM-3T adalah program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan pendidikan, percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T.

C. Tujuan

Program SM-3T dilakukan dengan tujuan:

1. membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan, terutama kekurangan tenaga guru;

2. memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, serta memiliki jiwa ketahananmalangan dalam mengembangkan pendidikan pada daerah-daerah yang tergolong 3T;
3. menyiapkan sarjana yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik pada daerah 3T;
4. membantu percepatan pembangunan daerah 3T melalui kegiatan pendidikan dan *community development*.

D. Ruang Lingkup

Program SM-3T dilakukan dengan cakupan:

1. melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan tuntutan kondisi setempat;
2. mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah;
3. melakukan kegiatan ekstrakurikuler;
4. membantu tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pendidikan di sekolah; dan
5. melakukan tugas sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah 3T.

E. Landasan Yuridis

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
4. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
7. Permendikbud No. 11 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



BAB II REKRUTMEN DAN SELEKSI PESERTA PROGRAM SM-3T

A. Sasaran

Peserta adalah lulusan program studi kependidikan S-1 tiga tahun terakhir (2014, 2015, 2016) dari program studi terakreditasi minimal B sesuai dengan mata pelajaran dan/atau bidang keahlian yang dibutuhkan. Sejumlah 3.143 orang calon yang telah lulus seleksi administrasi, seleksi akademik melalui daring, wawancara dan simulasi serta telah diafirmasi. Namun demikian hanya 3037 peserta melakukan registrasi ulang Prakondisi dan dijadwalkan mengikuti Prakondisi pada masing-masing LPTK Penyelenggara. Prakondisi merupakan salah satu seleksi tahap akhir sebelum peserta ditempatkan ke wilayah SM3T. Jumlah ini merupakan antisipasi, karena beberapa peserta kemungkinan gugur dari program Prakondisi karena beberapa sebab yang mendasar, seperti masalah **kesehatan, moral-mental, dan disiplin**. Pada masa pelepasan peserta SM3T, jumlah kuota yang dikirimkan adalah sebanyak 3.000 orang secara nasional dan ditempatkan pada wilayah 3T untuk angkatan ke-6 (tahun 2016).

B. Perguruan Tinggi Penyelenggara

Program SM-3T tahun 2016 ini diselenggarakan dengan melibatkan 12 Perguruan Tinggi Penyelenggara dan 1 Perguruan Tinggi Mitra. Direncanakan ada 2 Perguruan Tinggi Mitra yaitu Universitas Musamus dan Universitas Cendrawasih, yang berada di bawah pembinaan Universitas Makassar. Namun demikian hanya

Universitas Musamus yang telah siap melaksanakan rekrutmen dan seleksi pada tahun 2016. Sedangkan Universitas Cendrawasih masih belum menanggapi kesempatan sebagai universitas mitra pada tahun ini. Dalam pelaksanaan program SM-3T, Perguruan Tinggi diwajibkan memenuhi standar minimal Sarana & Prasarana dan menyediakan Panitia (SDM) penyelenggara yang memadai sebagai berikut:

1) Sarana & Prasarana :

- a. Mampu menyediakan *Dedicated internet connection* minimal 2Mbps (rerata 20 kbps)/ peserta.
- b. Daya tampung laboratorium Komputer minimal 50 komputer dengan 10 cadangan
- c. Laboratorium komputer terkoneksi dengan internet
- d. Laboratorium komputer memiliki cadangan power berupa genset/ UPS yang bertahan minimal 90 menit.
- e. Komputer terinstalasi *operating system* minimal Windows Xp atau OS dan bebas virus dan tanpa Proxy mode.

2) Standar Panitia (SDM) Penyelenggara:

- a. Menugaskan 1 orang PIC yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai sistem jaringan dan sekaligus bertanggung jawab :
 - a) atas kesiapan sarana dan prasarana
 - b) atas penyelenggaraan seleksi calon guru SM-3T
 - c) untuk melakukan koordinasi dengan Panitia Pusat.
- b. Menugaskan PIC untuk mengikuti TOT yang diselenggarakan oleh Panitia Pusat Kemendikbud.

- c. Menugaskan :
 - a) minimal dua orang per laboratorium yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal *soft ware* dan *hard ware* guna bertugas pada saat pelaksanaan Seleksi SM3T.
 - b) minimal satu orang petugas verifikator untuk administrasi di tiap lokasi.
- d. Menugaskan 1 orang pengelola ruang.
- e. Menugaskan minimal 1 orang pengawas ujian.

C. Kesiapan Jaringan Lunak untuk Rekrutmen dan Seleksi

Jaringan lunak dalam proses, disiapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Server terpusat
- b. *Web based testing app system*
- c. Akses klien tes (*web browser*) khusus
- d. *Operating system computer client* berbasis Windows atau MacOS

D. Rekrutmen

Rekrutmen dilaksanakan secara daring sejak tanggal 6 Juni 2016 pukul 09.00 WIB – 4 Juli 2016 pukul 23:59 WIB. Informasi daring dilakukan melalui web www.gtk.kemdikbud.go.id, seleksi.dikti.go.id/sm3t dan pada web masing-masing LPTK, serta melalui media sosial *Facebook*.

Rekrutmen calon peserta merupakan salah satu kunci keberhasilan program SM-3T. Rekrutmen calon peserta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- a. Proses penerimaan dilakukan secara transparan, dan bertanggung jawab agar mendapatkan calon peserta yang berkualitas tinggi.
- b. Kelulusan calon peserta dalam seleksi ditentukan secara nasional.
- c. Untuk tahun 2016, calon peserta berasal dari prodi PGPAUD, PGSD, PLB, Bimbingan Konseling, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Seni Budaya (Drama, Tari, Musik), Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi, Pendidikan IPA, PPKn, Pendidikan IPS, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sosiologi/Antropologi, Pendidikan Teknik Elektro/Ketenagalistrikan, Pendidikan Teknik Elektronika, Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Otomotif, Pendidikan Teknik Bangunan, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Boga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Busana, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Rias, dan Pendidikan Jasmani.

2) **Persyaratan Peserta**

Peserta adalah lulusan program studi kependidikan yang pada saat menjadi mahasiswa datanya tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Selain itu peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP / SIM yang masih berlaku;
- b. Sarjana dari program studi kependidikan minimal S-1 lulusan tiga tahun terakhir (2014, 2015, 2016) dari program studi terakreditasi minimal B (sesuai dengan akreditasi terakhir BAN-PT); pas foto berwarna, soft copy ijazah dan transkrip nilai diunggah pada borang pendaftaran dari sistem informasi yang ada;
- c. Usia maksimum 27 tahun per 31 Desember 2016;
- d. IPK minimal 3,00; dibuktikan fotokopi transkrip nilai yang telah disahkan (legalisasi);
- e. Berbadan sehat; dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari klinik terdaftar / Puskesmas;
- f. Bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (napza)dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) serta Miras dari pejabat yang berwenang;
- g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres/Polresta;

- h. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti Program SM-3T yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000 rupiah;
- i. Belum pernah mengikuti program SM-3T pada tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Bukti persyaratan huruf (a) s.d. huruf (i) dibawa pada saat tes wawancara. Pada saat wawancara peserta juga diminta membawa contoh RPP sesuai bidang studi yang dibuat sendiri (berdasar topik tertentu yang dipilih). Khusus lulusan tahun 2016 yang belum memiliki ijazah, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang ditandatangani dan/atau diketahui Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik, sedangkan ijazah dan transkrip nilai asli wajib ditunjukkan pada saat wawancara.

3). Verifikasi

- a) Semua peserta yang telah melakukan pendaftaran dalam jaringan, akan terverifikasi karena semua proses pendaftaran ditautkan dengan laman BAN PT yaitu <http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php> dan PDPT Kemenristekdikti. Dengan demikian akan terjadi kesesuaian antara nama program studi yang diinput dalam jaringan dengan nama program studi dalam ijazah dan program studi yang dipilih peserta.
- b) Setiap peserta juga dipastikan memiliki akun / *password* akses tes adalah akun pendaftaran dan dipastikan melalui kode verifikasi.

E. Seleksi Calon Peserta

Seleksi calon peserta Program SM-3T Tahun 2016 dilakukan secara administratif (dalam jaringan), tes tertulis bidang studi (dalam jaringan) dan wawancara, serta simulasi dilaksanakan di LPTK yang dipilih sebagai LPTK Penyelenggara.

a. Seleksi Administrasi

Seluruh program seleksi dilakukan dan diprogram secara terpusat. Sekalipun tempat penyelenggaraan dilakukan pada LPTK Penyelenggara.

Seleksi melalui daring dilakukan dalam 2 tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi akademik melalui tes daring.

b. Seleksi Penguasaan Kompetensi Akademik Bidang Studi/Bidang Keahlian

Tes penguasaan kompetensi akademik bidang studi level S1, dimaksudkan untuk mengukur penguasaan bidang keahlian calon peserta sesuai dengan latar belakang program studi kesarjanaannya. Tes penguasaan kompetensi bidang studi dilaksanakan dengan durasi waktu 90 menit.

Peserta yang lulus seleksi administratif dan akademik, selanjutnya dapat mengikuti seleksi wawancara dan simulasi di LPTK.

c. Wawancara seleksi dan Simulasi RPP di LPTK.

Setelah menyelesaikan tes daring, peserta mengikuti Seleksi di LPTK meliputi verifikasi dokumen tertulis yang dibawa pada waktu wawancara, dan simulasi.

Wawancara bertujuan untuk menemu kenali persoalan yang berhubungan dengan persoalan persoalan personal, potensi minat dan bakat sebagai pendidik. Sedangkan Simulasi merupakan langkah penerapan RPP dalam pengajaran yang dilakukan oleh peserta SM-3T. Simulasi penerapan RPP digunakan untuk menguji kemampuan calon Guru dalam hal kompetensi pedagogik, kompetensi keperibadian, kompetensi sosial-komunikasi, dan kompetensi profesional.



BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM SM-3T

A. LPTK Penyelenggara

Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan 12 LPTK sebagai penyelenggara Program SM-3T. Keduabelas LPTK beserta kuota disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. LPTK Penyelenggara Program SM-3T dan Kuota

No	LPTK Penyelenggara
1	Universitas Negeri Medan (UNIMED)
2	Universitas Negeri Padang (UNP)
3	Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
4	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
5	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
6	Universitas Negeri Malang (UM)
7	Universitas Negeri Semarang (UNNES)
8	Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
9	Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA)
10	Universitas Negeri Makassar (UNM)
11	Universitas Musamus (Mitra Universitas Makassar)
12	Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
13	Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH)

B. Daerah Sasaran

Daerah sasaran program SM-3T ini adalah kabupaten-kabupaten di Indonesia yang masuk dalam kategori daerah 3T. Adapun daerah sasaran program SM3T tersebut ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: *Pertama*, daerah tersebut adalah daerah tertinggal sesuai dengan penetapan yang telah dibuat oleh Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. *Kedua*, daerah tersebut masuk dalam Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 sebagaimana dibuat oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia. *Ketiga*, kawasan tersebut dianggap mengalami proses pendangkalan ideologi, filosofi, dan dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Badan Intelijen Negara. *Keempat*, daerah tersebut *harus* bukan termasuk sasaran program Guru Garis Depan (GGD).

Berdasarkan kriteria tersebut, daerah sasaran program SM3T ini meliputi dua puluh provinsi: Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dengan perincian sebagai berikut.

1. Provinsi Aceh

- a. Kabupaten Simeulue
- b. Kabupaten Aceh Singkil
- c. Kabupaten Gayo Luwes

2. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- a. Kabupaten Sumba Timur
- b. Kabupaten Belu
- c. Kabupaten Timor Tengah Utara
- d. Kabupaten Manggarai Barat
- e. Kabupaten Sumba Barat Daya
- f. Kabupaten Timor Tengah Selatan
- g. Kabupaten Sabu Raijua
- h. Kabupaten Malaka

3. Provinsi Sulawesi Utara

- a. Kabupaten Kepulauan Talaud
- b. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- c. Kabupaten Sitaro

4. Provinsi Papua

- a. Kabupaten Pegunungan Bintang
- b. Kabupaten Asmat
- c. Kabupaten Boven Digul
- d. Kabupaten Merauke
- e. Kabupaten Mamberamo Tengah
- f. Kabupaten Nabire
- g. Kabupaten Dogiyai

5. Provinsi Papua Barat

- a. Kabupaten Teluk Wondama

6. Provinsi Kepulauan Riau

- a. Kabupaten Karimun
- b. Kabupaten Natuna
- c. Kabupaten Anambas

7. Provinsi Kalimantan Barat

- a. Kabupaten Sambas
- b. Kabupaten Bengkayang
- c. Kabupaten Kapuas Hulu
- d. Kabupaten Melawi
- e. Kabupaten Kayong Utara
- f. Kabupaten Sanggau

8. Kalimantan Utara

- a. Kabupaten Nunukan

9. Provinsi Kalimantan Timur

- a. Kabupaten Berau

10. Provinsi Maluku

- a. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- b. Kabupaten Maluku Barat Daya
- c. Kabupaten Maluku Tengah
- d. Kabupaten Seram Bagian Barat

11. Provinsi Maluku Utara

- a. Kabupaten Kepulauan Sula
- b. Kabupaten Pulau Taliabu

12. Provinsi Sumatera Utara

- a. Kabupaten Nias Selatan
- b. Kabupaten Nias Barat

13. Provinsi Sumatera Barat

- a. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- b. Kabupaten Solok Selatan
- c. Kabupaten Pasaman Barat

- 14. Provinsi Bengkulu**
 - a. Kabupaten Seluma
- 15. Provinsi Lampung**
 - a. Kabupaten Pesisir Barat
- 16. Provinsi Nusa Tenggara Barat**
 - a. Kabupaten Dompu
- 17. Provinsi Sulawesi Tengah**
 - a. Kabupaten Banggai Kepulauan
 - b. Kabupaten Toli-Toli
 - c. Kabupaten Parigi Mutong
 - d. Kabupaten Tojo Una-Una
 - e. Kabupaten Banggai Laut
 - f. Kabupaten Morowali Utara
- 18. Provinsi Sulawesi Tenggara**
 - a. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 19. Provinsi Gorontalo**
 - a. Kabupaten Boalemo
- 20. Provinsi Sulawesi Barat**
 - a. Kabupaten Polewali Mandar

Jika anggaran memungkinkan, daerah-daerah lain di luar daerah tersebut dapat menjadi daerah sasaran program ini dengan prioritas sebagai berikut:

- 1. Provinsi Nusa Tenggara Timur**
 - a. Kabupaten Kupang
 - b. Kabupaten Alor
 - c. Kabupaten Rotendao
 - d. Kabupaten Nagekeo
- 2. Provinsi Papua**
 - a. Kabupaten Lani Jaya
 - b. Kabupaten Yalimo
 - c. Kabupaten Keerom
 - d. Kabupaten Sarmi
- 3. Provinsi Papua Barat**
 - a. Kabupaten Sorong Selatan
 - b. Kabupaten Sorong
 - c. Kabupaten Raja Ampat
- 4. Provinsi Kepulauan Riau**
 - a. Kabupaten Bintan
 - b. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5. Provinsi Kalimantan Barat**
 - a. Kabupaten Landak
 - b. Kabupaten Sintang
- 6. Provinsi Kalimantan Utara**
 - a. Kabupaten Malinau
- 7. Provinsi Kalimantan Timur**
 - a. Kabupaten Mahakam Hulu

8. Provinsi Maluku

- a. Kabupaten Kepulauan Aru
- b. Kabupaten Buru

9. Provinsi Maluku Utara

- a. Kabupaten Pulau Morotai
- b. Kabupaten Halmahera Barat
- c. Kabupaten Halmahera Selatan
- d. Kabupaten Halmahera Timur

10. Provinsi Sumatera Utara

- a. Kabupaten Nias

11. Provinsi Sumatera Selatan

- a. Kabupaten Musi Rawas
- b. Kabupaten Musi Rawas Utara

12. Provinsi Jawa Timur

- a. Kabupaten Situbondo
- b. Kabupaten Bangkalan
- c. Kabupaten Sampang

13. Provinsi Banten

- a. Kabupaten Pandeglang

14. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- a. Kabupaten Lombok Barat
- b. Kabupaten Lombok Tengah
- c. Kabupaten Lombok Timur
- d. Kabupaten Bima
- e. Kabupaten Sumbawa Barat
- f. Kabupaten Lombok Utara

15. Provinsi Kalimantan Tengah

- a. Kabupaten Seruyan

16. Provinsi Kalimantan Selatan

- a. Kabupaten Hulu Sungai Utara

17. Provinsi Sulawesi Tengah

- a. Kabupaten Buol

18. Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Kabupaten Jeneponto

19. Provinsi Sulawesi Tenggara

- a. Kabupaten Konawe
- b. Kabupaten Bombana

20. Provinsi Gorontalo

- a. Kabupaten Pohuwatu
- b. Kabupaten Gorontalo Utara

21. Provinsi Sulawesi Barat

- a. Kabupaten Mamuju Tengah

C. Jadwal Persiapan dan Pelaksanaan Program SM-3T 2016

Berikut disajikan rencana jadwal persiapan dan pelaksanaan Program SM-3T Tahun 2016.

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1	Pendaftaran Peserta secara on-Line(Pengisian Borang, up load ijazah dan Foto)	6 Juni 2016 pukul 07:00 WIB – 4 Juli 2016 pukul 23:59 WIB
2	Pengumuman hasil seleksi administrasi <i>online</i> dan Pengumuman jadwal tes <i>online</i>	19 Juli 2016
3	Tes Seleksi online	25-28 Juli 2016
4	Pengumuman Hasil Tes Seleksi <i>online</i> dan undangan Wawancara di LPTK	29 Juli 2016
5	Wawancara Seleksi di LPTK	1-4 Agustus 2016
6	Koordinasi Penetapan Kelulusan dan penempatan berdasar pemetaan.	24-27 Agustus 2016
7	Pengumuman pemanggilan Peserta untuk Prakondisi, Pelatihan	5 Agustus 2016
8	Prakondisi, Pelatihan	15 Agustus – 1 Sept 2016
9	Pemberangkatan dan Penempatan	1 September 2016
10	Monitoring dan Evaluasi	13-17 Oktober 2016
11	Workshop Evaluasi Akhir Program	15-19 November 2016
12	Analisis dan Pengolahan Hasil Pendampingan Program SM-3T	22-25 November 2016

D. Kegiatan Prakondisi

Sebelum peserta diberangkatkan ke daerah sasaran untuk melaksanakan program SM-3T, dilakukan seleksi program

prakondisi yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara. Prakondisi dimaksudkan untuk membekali kesiapan peserta sekaligus sebagai seleksi kesiapan fisik dan mental.

Program prakondisi diawali dengan pemberian orientasi umum tentang pendidikan di daerah 3T, dengan materi: (1) membawa peserta ke alam psikologis dan sosiologis daerah sasaran melalui pemutaran film dokumenter program SM-3T angkatan sebelumnya, Laskar Pelangi, atau film sejenis; (2) pemberian informasi tentang kondisi pendidikan di daerah 3T yang antara lain tentang kekurangan tenaga guru, disparitas kualitas, *mismatched*, tingginya angka putus sekolah, dan rendahnya angka partisipasi sekolah; dan (3) orientasi tentang sosial, budaya, dan kondisi infrastruktur daerah sasaran (10 JP).

Prakondisi meliputi kegiatan akademik dan non-akademik. Prakondisi akademik meliputi: (1) pelatihan melaksanakan tugas kependidikan pada kondisi khusus/tertentu (jumlah guru sangat kurang, kemampuan siswa rendah, dan sarana-prasarana terbatas) (2) kepemimpinan dan manajemen pendidikan di sekolah.

Prakondisi nonakademik meliputi: (1) pembinaan mental; (2) pelatihan keterampilan sosial kemasyarakatan, (3) wawasan kebangsaan dan bela negara serta (4) kepramukaan, P3K, serta keterampilan *survival* lainnya (seperti keterampilan berenang, penggunaan pelampung, dan sejenisnya).

1. Prakondisi Akademik

a. Pembekalan Kurikulum 2013

Untuk SM-3T angkatan VI tahun 2016, peserta dituntut sudah memiliki kesiapan untuk mengimplementasikan Kurikulum 13 di daerah pengabdian. Oleh karena itu, dalam prakondisi SM-3T mereka perlu diberi pembekalan mengenai konsep dasar dan implementasi Kurikulum 13. Alokasi waktu untuk pembekalan Kurikulum 13 adalah 10 jam pelajaran.

b. Pelatihan Melaksanakan Tugas Kependidikan pada Kondisi Khusus/Tertentu

Kegiatan pelatihan ini dimaksudkan untuk membekali peserta Program SM-3T agar memiliki kemampuan mengajar pada kondisi khusus. Sebagai contoh pada kondisi sekolah kekurangan guru, peserta dibekali kemampuan mengajar pada kelas rangkap dan mengajar multi-subjek. Contoh lain, untuk kondisi kekurangan sarana untuk pembelajaran, peserta dibekali kemampuan berkreasi membuat media pembelajaran berbasis lingkungan, LKS, dan bahan ajar lainnya. Pelatihan melaksanakan tugas kependidikan pada kondisi khusus difasilitasi oleh dua orang instruktur untuk setiap rombongan belajar dengan alokasi waktu 40 JP. Selain itu, peserta dibekali pendidikan revolusi mental yang akan langsung diberikan oleh Staff Kepresidenan. Untuk pelatihan ini juga dilibatkan peserta PPG SM-3T, yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan profesi. Jumlah peserta PPG SM-3T yang dilibatkan, sesuai kebutuhan.

c. Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan di Sekolah

Materi ini dimaksudkan untuk membekali peserta Program SM-3T agar memiliki wawasan tentang

kepemimpinan dan manajemen pendidikan di sekolah. Materi kepemimpinan pendidikan difokuskan pada fungsi kepala sekolah sebagai *leader*, *manager*, dan *supervisor*. Materi manajemen pendidikan di sekolah difokuskan pada pengelolaan kurikulum, sarana prasarana, dan kesiswaan. Alokasi waktu untuk materi ini selama 10 JP.

d. Perencanaan Kegiatan Tahunan

Materi ini berisi penyusunan program selama satu tahun ke depan, yang terbagi dalam empat sub-materi: perencanaan kegiatan triwulan ke-1, perencanaan kegiatan triwulan ke-2, perencanaan kegiatan triwulan ke-3, dan perencanaan kegiatan triwulan ke-4. Alokasi waktu untuk materi ini selama 20 JP.

2. Prakondisi Nonakademik

a. Pelatihan Keterampilan Sosial Kemasyarakatan dan *networking*

Pelatihan keterampilan sosial kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk membekali kompetensi sosial dan kemasyarakatan kepada peserta agar mampu melaksanakan tugasnya dalam berkomunikasi secara aktif dengan pihak sekolah dan masyarakat. Materi kegiatan ini terdiri atas tiga pokok bahasan, yaitu: (a) kecepatan beradaptasi (sosioantropologi dan kemampuan komunikasi sosial), (b) pemberdayaan masyarakat dan keluarga (berbasis budaya, ekonomi, dan ekologi), (c) pelatihan kepemimpinan, dan (d) pelatihan teknologi tepat guna (TTG).

Narasumber untuk materi yang terkait dengan butir (a) dan (b) adalah pejabat dari daerah sasaran yang relevan dan kompeten. Sedangkan narasumber untuk materi butir (c) dan (d) dapat diambil dari dosen LPTK penyelenggara yang kompeten pada bidang tersebut. Alokasi waktu untuk kegiatan keterampilan sosial kemasyarakatan ini sebanyak 20 JP.

b. Pembinaan Mental, Motivasi, dan Manajemen Risiko

Pembinaan mental dimaksudkan untuk membangun karakter para peserta agar memiliki karakter tangguh dan peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa ketahananmalangan dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan hidup di daerah sasaran. Materi pembinaan ini meliputi pemberian motivasi, penyampaian wawasan, dan contoh-contoh nyata kelompok masyarakat dalam keadaan terbatas tetapi mampu bertahan hidup. Dilanjutkan praktik di lapangan yang dapat berupa *outbond* dan pemberian pengalaman hidup yang penuh tantangan dan rintangan. Narasumber kegiatan ini adalah dosen LPTK atau dapat berasal dari insitusi/masyarakat yang memiliki pengalaman dan wawasan yang relevan dengan kegiatan ini (20 JP).

c. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Materi ini dimaksudkan untuk memperkokoh wawasan peserta program SM-3T tentang ideologi nasional, integrasi nasional, tujuan dan cita-cita nasional, cinta tanah air, kesadaran bela negara, dan konstelasi

geografis NKRI. Materi ini juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran akan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, serta keanekaragaman budaya dan adat istiadat di Indonesia. Peserta diharapkan mampu menyosialisasikan dan menanamkan wawasan kebangsaan dan bela negara di daerah 3T.

Materi pembinaan mental, motivasi, dan manajemen risiko, serta materi wawasan kebangsaan dan bela negara (2.b. dan 2.c.) dilaksanakan secara terintegrasi dengan alokasi waktu 30 JP (20 JP untuk poin 2.b dan 10 JP untuk poin 2.c.).

d. Kepramukaan, UKS, P3K, dan Keterampilan Survival

Materi kepramukaan dilaksanakan dengan maksud membekali peserta SM-3T memiliki keterampilan dasar kepramukaan. Materi UKS dan P3K dimaksudkan untuk membekali peserta SM-3T memiliki kemampuan dasar tentang kesehatan sekolah dan lingkungan, serta memiliki keterampilan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Materi untuk pengembangan keterampilan survival meliputi keterampilan berenang, penggunaan pelampung, perlindungan pada saat bencana, dan sebagainya. Narasumber materi ini dapat berasal dari dosen atau unit kegiatan yang relevan di lingkungan LPTK. Alokasi waktu untuk materi ini adalah sebanyak 20 JP.

**Jadwal Pra kondisi dan Pembekalan
(15 Agustus – 1 September 2016)**

Hari	Waktu	Kegiatan	JP	Keterangan
1	Orientasi umum	Upacara Pembukaan Kuliah Umum Rektor tentang SM-3T	3	Dilaksanakan hari Pertama
		Pemutaran film	1	
		Membawa peserta ke alam sosiologis daerah 3T	2	Testimoni oleh alumni SM-3T
		Informasi ttg kondisi pendidikan daerah 3T	2	Dinas (jadwal menyesuaikan dg dinas Pendidikan daerah)
		Orientasi ttg sosbud dan infrastruktur 3T	2	Dinas (jadwal menyesuaikan dg dinas Pendidikan daerah)
2	Revolusi mental	Revolusi mental	5	Tim PMK
3	Kurikulum 13 (10)	Konsep dasar Ku'13	2	
		sistem pembelajaran	2	
		sitem penilaian	2	
		Model pembelajaran	2	
		Orientasi Pengembangan Perangkat	2	
4	Pelatihan melaksanakan tugas kependidikan pd kondisi khusus/tertentu (40)	WS Pengembangan perangkat pada kelas reguler	10	
		WS Pengembangan perangkat pada kelas rangkap	10	
		Praktik mengajar kelas reguler	10	
		Praktik mengajar kelas rangkap	10	
5	Kepemimpinan dan manajemen pendidikan di sekolah (10)	Kepemimpinan kepala sekolah sbg leader, dll	2	
		Manajemen kurikulum sekolah	2	

		Manajemen sarana prasarana	2	
		Manajemen kesiswaan	2	
		Pembuatan proposal peningkatan mutu sekolah	2	
6	Perencanaan kegiatan tahunan (15)	Konsep dasar perencanaan kegiatan/program	3	
		WS Penyusunan rencana kegiatan tri wulan I	3	
		WS Penyusunan rencana kegiatan tri wulan II	3	
		WS Penyusunan rencana kegiatan tri wulan III	3	
		WS Penyusunan rencana kegiatan tri wulan IV	3	
	Total		90 jp	

3	Non Akademik			
	A. Pelatihan Keterampilan Sosial Kemasyarakatan dan <i>networking</i>	20 JP		
	1. Pengertian ketrampilan sosial dan penerapan-nya dalam modifikasi perilaku			
	a. Pengertian dan Penerapan ketrampilan sosial (T)	2 JP	LPTK	
	b. Pelatihan ketrampilan sosial untuk terapi kesulitan bergaul (P+T)	3 JP	LPTK	
	c. Pemberdayaan Masyarakat (T+P)	3 JP	LPTK	
	2. Kemampuan Komunikasi			
	a. Perilaku dan Prosedur Komunikasi	2 JP	LPTK	
	b. latihan berkomunikasi 6 JP (P)	6 JP	LPTK	
	3. Networking 4 JP (T+P)			
	a. Prinsip kerjasama 1 jp (T)	1 JP	LPTK	
	b. Kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja (P)	3 JP	LPTK	
	B. Pembinaan Mental, Motivasi, dan Manajemen Risiko			
	1. Membangun karakter tangguh(P) 7 jp	7 JP	TNI/Polri/	
	2. Membangun Motivasi berprestasi(P) 7 jp	7 JP	Menwa	
	3. Menghitung Manajemen resiko(P) 6 jp	6 JP	TNI/Polri/Menwa	
			LPTK	

	C. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara		
	1. Ideologi nasional (Penebalan Nasionalisme dan Wawasan didaerah 3T) 2 jp	2 JP	TNI/Polri/BIN
		2 JP	TNI/Polri
	2. Tujuan dan cita-cita nasional 2 jp	3 JP	TNI/Polri
		3 JP	TNI/Polri
	3. Kesadaran bela Negara 3 jp T		
	4. NKRI 3 jp		
	D. Kepramukaan, UKS, P3K, dan Keterampilan survival	4 JP	LPTK
	1. Kepramukaan 4 jp (TP)	4 JP	LPTK
	2. UKS 4 jp (TP)	4 JP	LPTK
	3. P3K 4 jp (TP)		
	4. Keterampilan Ketahananmalangan (survival) (P)	8 JP	LPTK
	Total	70 JP	160 JP

E. Pemberangkatan Peserta

Pemberangkatan dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara. LPTK penyelenggara berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah serta Dinas Pendidikan daerah 3T dan menugaskan dosen atau staf untuk mendampingi peserta dengan memerhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Waktu penerimaan oleh bupati (kepala daerah)
- (2) Penjemputan peserta dari ibukota kabupaten menuju tempat tinggal (lokasi pengabdian) didampingi pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, kepala desa, camat, dan orang tua asuh;
- (3) Hal-hal lain yang diperlukan, sesuai dengan kebutuhan setempat.

F. Pelaksanaan di Daerah 3T

Pelaksanaan program SM-3T, baik di sekolah tempat pengabdian maupun di lokasi tempat tinggal peserta, dilakukan dalam kegiatan akademik dan nonakademik. Hal-hal yang harus dilakukan oleh peserta diantaranya: menyusun program kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas selama berada di daerah sasaran; melaksanakan kegiatan dengan penuh waktu, penuh rasa tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi; membina kerjasama dengan sesama peserta, masyarakat setempat, dan instansi terkait; berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan; dan membuat catatan harian, laporan tengah tahunan dan laporan akhir tahun.

G. Monitoring dan Evaluasi

Setelah peserta diberangkatkan ke lokasi 3T, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan LPTK penyelenggara bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi peserta dalam rangka menjamin keberhasilan program SM-3T. Monitoring dan evaluasi SM-3T dilaksanakan untuk membandingkan pelaksanaan dari rencana dan mengusulkan rencana tindaklanjut (RTL) sehingga ketidaksesuaian yang terjadi dapat ditanggulangi pada waktu yang akan datang.

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara periodik dan berkelanjutan untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik dan setiap peserta melaksanakan tugas pengabdianya secara bertanggung jawab. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk membantu peserta mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Dalam prosesnya, Monitoring dan evaluasi tersebut melibatkan pihak-pihak terkait seperti guru setempat, kepala sekolah, kepala desa, tokoh masyarakat, UPTD dan Dinas Pendidikan, serta pemerintah daerah. Apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan, maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan LPTK penyelenggara dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu: 1) Monev Awal (bulan September 2016); 2) Monev Pelaksanaan (November 2016); 3) Monev Hasil (bulan Maret-April 2017); dan 4) Monev Dampak (Juli-Agustus 2017).

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh beberapa Tim: (1) Tim Pusat, yang akan melakukan monev LPTK, (2) LPTK, yang akan melakukan monev Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan peserta SM-3T, sedangkan (3) Kepala Dinas, yang akan melakukan monev Kepala Sekolah dan tokoh masyarakat dan/atau komite.

H. Penarikan Peserta

Setelah masa pengabdian di daerah 3T berakhir, Ditjen GTK dan LPTK Penyelenggara melakukan penarikan peserta, dengan menugaskan dosen atau staf untuk melakukan penjemputan ke daerah 3T. Sebelum penarikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan LPTK Penyelenggara melakukan koordinasi dengan peserta dan Dinas Pendidikan daerah 3T.

I. Pelaporan

Peserta diwajibkan membuat laporan pelaksanaan kegiatan selama berada di daerah pengabdian, baik di sekolah maupun di lokasi tempat tinggal peserta, yang terdiri atas: catatan harian, laporan tengah tahunan, laporan akhir tahun, dan profil sekolah. LPTK dapat menambahkan bentuk tagihan yang lain, seperti: membuat laporan tertulis tentang pengalaman menarik dan testimoni.

J. Pembiayaan Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program SM-3T Tahun 2016 dibiayai dengan dana APBN (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 melalui anggaran Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dengan Nomor 023-16.1.361153/2016, tanggal 07 Desember 2015 revisi tanggal 10 Maret 2016.

